



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

http://kliping.dpr.go.id

Judul	: BP Haji Naik Kelas Menjadi Kementerian Haji dan Umrah
Tanggal	: Sabtu, 30 Agustus 2025
Surat Kabar	: Rakyat Merdeka
Halaman	: 2

BP Haji Naik Kelas Menjadi Kementerian Haji & Umrah

Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) akan berubah menjadi terobosan di bidang haji dan umrah. Lantas, apa saja yang akan dilakukan kementerian ini?

Sebelumnya, DPR resmi mengesahkan Revisi Undang-Undang (RUU) tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen Jakarta, Selasa (26/8/2025). Pengesahan dilakukan setelah Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal selaku pimpinan rapat, meminta persetujuan kepada seluruh anggota yang hadir.

"Apakah Undang-Undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perjalanan Haji dan Umrah dapat setuju untuk disahkan menjadi undang-undang?" tanya Cucun di ruang rapat.

"Setuju," jawab para anggota DPR serentak.

Sebelum persetujuan diambil, paripurna terlebih dahulu mendengar laporan Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan

Dasopang, mengenai hasil pembahasan revisi undang-undang tersebut. Dalam laporannya, Marwan punya poin utama revisi adalah perubahan kelengkapan penyelenggara ibadah haji dan umrah yang sebelumnya berbentuk BP Haji, kini ditetapkan menjadi Kementerian Haji dan Umrah.

"Panja Komisi VIII DPR RI dan Panja Pemerintah Republik Indonesia bersepakat, kelembagaan penyelenggara berbentuk Kementerian Haji dan Umrah," ujar Marwan dalam laporannya.

Menurut dia, kehadiran kementerian akan menghadirkan pelayanan haji dan umrah yang terintegrasi di bawah satu atap. "Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia akan mengintegrasikan stafsip dan kantor-kantor yang terkait dengan penyelenggaraan haji akan dikendalikan dan dikoordinasikan oleh Kementerian Haji dan Umrah," kata Marwan.

Sementara itu, Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, Kementerian Haji dan Umrah akan fokus pada persiapan pelaksanaan haji musim

2026. Terutama masalah data jemaah, istihaah (kemampuan kerja), dan pengelolaan keuangan kerja.

"Kami dihadapkan dengan tantangan yang tidak mudah. Namun, kami dimudahkan karena sudah terlibat persiapan haji sejak 2025 dan akan full menangani di tahun 2026 ini," ujar Dahnil kepada *Rakyat Merdeka*, Jumat (29/8/2025).

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Brawijaya, Andhyka Muttagin menilai perubahan dari BP Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah merupakan sebuah terobosan. Tetapi, dia menegaskan perlu ada langkah khusus untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan terkait haji.

"Kerjanya kerap harus extra ya. Apalagi pembentukannya memang selesai tahun 2025 dan pelaksanaannya sudah di awal tahun 2026," ujar Andhyka kepada *Rakyat Merdeka*, Jumat (29/8/2025).

Untuk mengetahui lebih jelas pandangan dari Dahnil Anzar Simanjuntak dan Andhyka Muttagin mengenai pembentukan Kementerian Haji dan Umrah, berikut wawancaranya.

DAHNIL ANZAR SIMANJUNTAK
Wakil BP Haji

Tahun Ini, Kami Fokus Benahi Data Jemaah



“

Kementerian Haji dan Umrah nanti akan menjadi otoritas tunggal penyelenggaraan dan pengelolaan haji Indonesia. Mulai dari penyelenggaraan, pelayanan dan pengembangan ekonomi haji.

ANDHYKA MUTTAQIN, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Brawijaya Malang

Penanganan Antrean Haji Harus Lebih Baik



“

Ya, saya melihatnya sebagai terobosan yang sangat efektif dan efisien. Tentu, tantangannya besar. Menteri yang baru harus bekerja ekstra keras, lincah, dan bisa beradaptasi dengan cepat.

BP Haji sudah mewujudkan perubahan ini. Apakah kesiapan Kementerian Haji dan Umrah, kesiapan mancanegara dan instansi apa Kementerian ini?

Kementerian Haji dan Umrah nanti akan menjadi otoritas tunggal penyelenggaraan dan pengelolaan haji Indonesia. Mulai dari penyelenggaraan, pelayanan dan pengembangan ekonomi haji.

Bagaimana sumber daya manusianya?

Perseleksi ASN dari Kementerian Agama, Kementerian Kesehatian, Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, Kementerian Hukum dan HAM, Keuangan dan instansi lainnya. Namun, ditinjau provinsi dan kabupaten berdasarkan sumber daya manusianya.

Apa ada saran khusus untuk

tingkat provinsi dan kabupaten?

Syaratnya kompetensi dan integritas.

Apakah pegawai di Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dishum) akan berpindah ke Kementerian Haji dan Umrah?

Sebagian ASN di PHU akan pindah, terutama pelaksana teknis dan beberapa pejabat yang kompeten dan berpengalaman.

Apa kesiapan Kementerian Haji dan Umrah ini langsung sepadan dengan pembentukan kementerian?

Menurut saya, pembentukan kementerian ini adalah bagian dari pembentukan kementerian.

Sebagian besar ASN di PHU akan berpindah ke Kementerian Haji dan Umrah. Apakah ada kendali penyelenggaraan ada di bawah BP Haji sampai Peraturan Presiden? Apakah ketika Kepatuhan Presiden dikeluarkan oleh Presiden, menjadi Kementerian Haji.

Apa saja yang akan menjadi fokus Kementerian Haji dan Umrah pada tahun pertama ini?

Kami akan fokus pada pembentahan data jemaah agar transparan dan akurabel. Kedua masalah teknis dan operasional banyak juga.

Sebagian ASN di PHU akan berpindah ke Kementerian Haji dan Umrah. Apakah ada kendali penyelenggaraan ada di bawah BP Haji sampai Peraturan Presiden? Apakah ketika Kepatuhan Presiden dikeluarkan oleh Presiden, menjadi Kementerian Haji.

Apa saja masalah yang paling mendesak?

Adalah perbaikan sistem.

Apa saja masalah yang sangat mendesak?

Perbaikan sistem.

Apa saja masalah yang sangat mendesak?